

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan perubahan yang signifikan dalam struktur sosial, sikap mental, dan lembaga-lembaga nasional. Hal ini mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penghapusan kemiskinan secara menyeluruh (Todaro,2003). Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu daerah dengan melihat proses pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang merata dengan proses pemerataan ekonomi yang optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah ketidakmerataan hasil pembangunan, yang menyebabkan ketimpangan antar daerah.

Menurut Kuznets pada analisisnya menguraikan bahwa pembangunan di suatu negara pada batasan tertentu dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi pada tiap-tiap masyarakat. Pada penelitiannya, Kuznet menemukan adanya keterkaitan pada tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang menyerupai seperti bentuk huruf U terbalik. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahap awal pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun, pada tahap selanjutnya, seiring peningkatan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan akan membaik.

Ketimpangan pembangunan dapat diamati dalam dua dimensi, yaitu secara vertikal (perbedaan dalam distribusi pendapatan) dan secara horizontal (perbedaan antara wilayah yang maju dan terbelakang), (Dwiputra, 2018) Ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi di setiap daerah, yang mengakibatkan perbedaan dalam kemampuan dan potensi di wilayah tersebut. Perbedaan ini membuat proses pembangunan di tiap-tiap daerah pun berbeda.

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan dalam jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat, yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan yang signifikan di dalam masyarakat (Todaro, 2003). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan nilai total produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah. Perbedaan nilai PDRB antar wilayah mencerminkan adanya perbedaan produktivitas antar wilayah. Ketimpangan pendapatan ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap daerah, serta kecenderungan pembangunan yang terpusat hanya pada daerah yang lebih maju. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan ini semakin melebar.

Kemiskinan menyebabkan ketimpangan pendapatan antara kaya dan miskin semakin timpang. Tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Negara berkembang semakin meningkat (Arsyad, 2017). Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan sangat penting agar kesenjangan pendapatan

dalam masyarakat semakin berkurang. Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan relative (Badrudin, 2017).

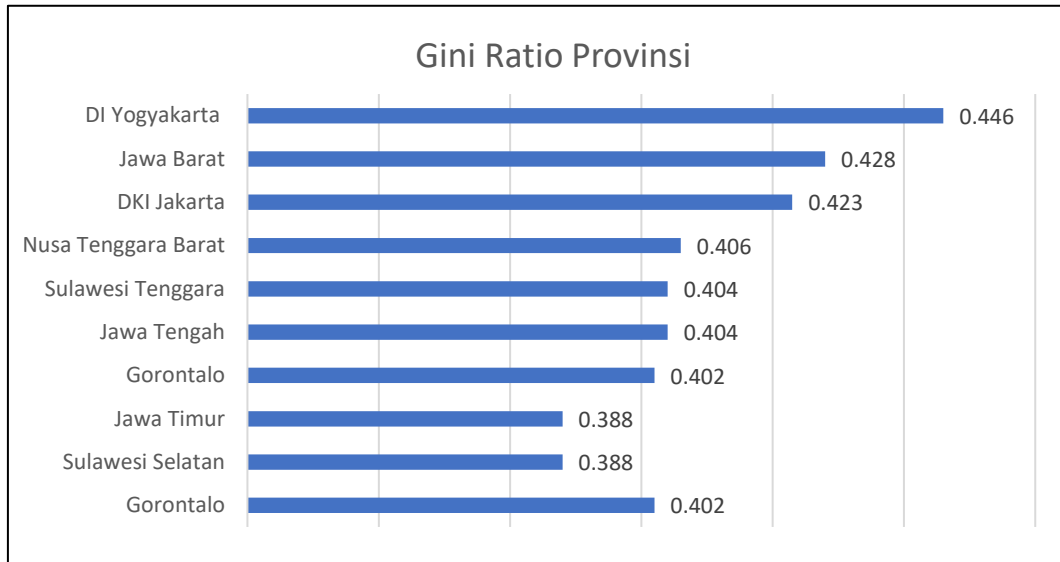
Faktor lain yang diduga menjadi faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi memengaruhi perkembangan melalui tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat, sementara pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik memiliki peran penting dalam mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010). Salah satu keuntungan terbesar Indeks Pembangunan Manusia adalah bahwa indeks tersebut menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pendapatan yang rendah dapat mencapai hasil yang jauh lebih baik dan peningkatan pendapatan yang besar dapat memiliki dampak relatif lebih kecil pada pembangunan manusia. (Todaro dan Smith, 2004). Tingkat produktivitas penduduk dipengaruhi oleh rendah atau tingginya indeks pembangunan manusia. Tingkat produktivitas penduduk akan dipengaruhi oleh rendah atau tingginya indeks pembangunan manusia. Semakin rendah indeks pembangunan manusia, maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah, kemudian dengan produktivitas yang rendah akan berdampak pada rendahnya pendapatan. Sebaliknya, semakin tinggi indeks pembangunan manusia, tingkat produktivitas penduduk akan lebih tinggi, yang berarti pendapatan akan meningkat. Permasalahan yang terjadi adalah indeks pembangunan manusia pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan indeks pembangunan manusia salah satu faktor yang berpengaruh

pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah. Dengan demikian indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi antar kabupaten/kota. Ketidakmerataan Indeks pembangunan manusia di tiap-tiap daerah akan menyebabkan adanya perbedaan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini akan ketidakseimbangan dalam pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terjadi terus dibiarkan maka ketimpangan pendapatan yang terjadi antar daerah akan semakin melebar.

Menurut Sukirno, (2007) Perkembangan jumlah penduduk memiliki peran yang bisa mendorong atau menghambat dalam proses pembangunan. Faktor ini dianggap sebagai pendorong karena dapat menyediakan lebih banyak tenaga kerja dan memperluas pasar barang dan jasa. Perluasan pasar tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk.

Berasarkan laporan BPS pada bulan Maret 2022, terdapat 10 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2022 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk ke dalam provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lainnya, dengan tingkat ketimpangan pendapatan mencapai 0,446.

Gambar 1.1 Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan Tertinggi di Indonesia (Maret 2022)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Selain menjadi provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa per Maret 2021. Persentase penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tersebut mencapai 12,80 persen. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi diantara seluruh provinsi di Pulau Jawa.

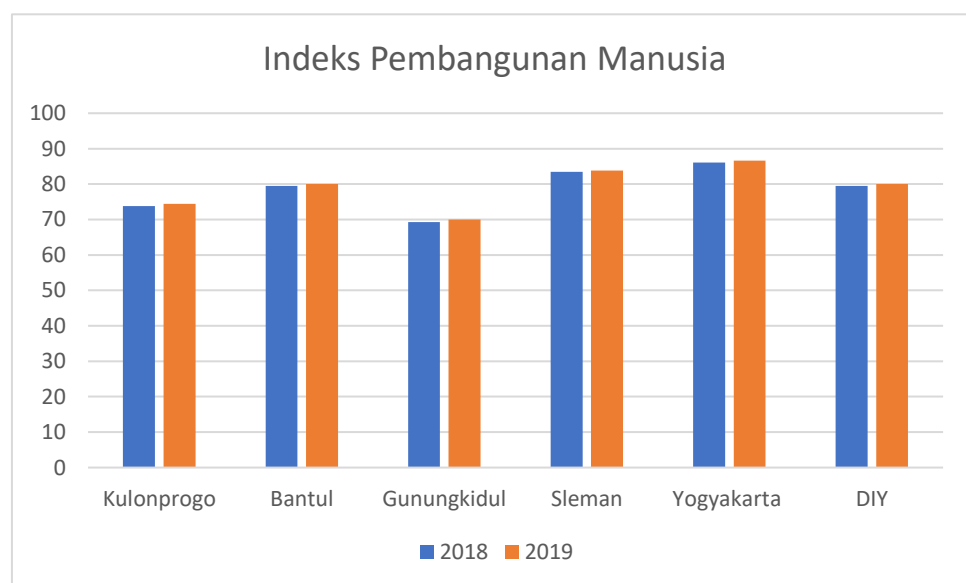
Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Di Pulau Jawa

Persentase Penduduk Miskin Miskin di Pulau Jawa		
2021		
Provinsi	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
DKI Jakarta	4,72	4,67
Jawa Barat	8,40	7,97
Jawa Tengah	11,79	11,25
DKI Yogyakarta	12,80	11,91
Jawa Timur	11,40	10,59
Banten	6,66	6,50
Bali	4,53	4,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan ada perbedaan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat tiga faktor yang menjadi perbandingan pengukuran indeks pembangunan manusia yakni tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan standar kehidupan dimana ketiga ini saling mempengaruhi satu sama lain.

Grafik 1.1 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2018-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, diolah

Grafik diatas menunjukkan perbandingan capaian di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya perbedaan capaian indeks pembangunan manusia tersebut dapat memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan dalam proses pembangunan. Dapat

di lihat Gunung Kidul menjadi kota dengan tingkat indeks pembangunan manusia yang paling rendah.

Tabel 1.2 Jumlah penduduk di Pulau Jawa

Provinsi	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
DKI Jakarta	73.628,85	65.192,61	57.647,44	109.202,90	119.092,45
Jawa Barat	99.951,34	105.042,26	103.500,66	107.761,89	122.587,06
Jawa Tengah	19.337,57	27.083,31	37.851,17	51.847,30	61.663,12
DI Yogyakarta	8.737,23	12.592,35	3.568,63	5.214,62	17.851,73
Jawa Timur	60.443,35	71.086,80	72.280,83	66.163,62	52.545,80
Banten	33.265,58	45.601,39	51.358,16	56.222,20	59.375,84

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tentunya hal ini akan berdampak pada ketimpangan pendapatan. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tingginya angka kelahiran di kalangan penduduk miskin, yang mana belum mampu memberikan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga dapat disebabkan oleh proses migrasi. Namun, tidak semua imigran membawa kemampuan atau keahlian yang dapat berkembang di tempat tujuan mereka.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, penulis tertarik untuk mengetahui kondisi ketimpangan pendapatan dan dampak dari PDRB, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis

mengangkat judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dari Produk Domestik Bruto (PDRB), kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2021?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui perkembangan dari Produk Domestik Bruto (PDRB), kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk

terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga terutama dalam bidang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, serta memberikan kontribusi pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan yang lebih luas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan khusus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan.